

SUBORDINASI SISWA DAN DOMINASI GURU (Tinjauan Kritis mengenai Politik Wacana Pendidikan)

Oleh: Arief Rohman¹

Pendahuluan

Ivan Illich dalam kalimat pembuka pada buku "*De-schooling Society*", menggugat secara mendasar berkenaan dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan sekolah tidak lagi diperlukan. "*Universal education through schooling is not feasible*", demikian bunyi kalimat pembukanya. Selain Illich, tokoh kritis lain adalah Everett Reimer serta ilmuwan Brazil yang cukup populer di Indonesia yakni, Paulo Freire. Ketiganya mencaci maki terutama mengenai distorsi penyelenggaraan pendidikan seperti fenomena ritualisme, konsistensi irrasional, alienasi sekolah, mental kecanduan serta stagnasi kesadaran kritis yang dialami siswa.

Sebagai kritisi terkemuka tahun 1970-an, Ivan Illich menemukan--paling tidak--tiga kegagalan lembaga yang dinamakan sekolah maupun pendidikan pada umumnya. *Pertama*, bahwa pendidikan sekolah secara empirik telah menghasilkan keluaran yang sesungguhnya kontra-produktif (*counterpro-ductive*). Sekolah yang seyogyanya meluluskan keluaran yang rasional, kreatif, dan bermoral, justru banyak menghasilkan sebaliknya yaitu lulusan yang kurang rasional, apatis, dan terkadang amoral. *Kedua*, bahwa dengan adanya sekolah, anak menjadi semakin terasing (*alienated*) dari kondisi lingkungan

Arief Rohman adalah staf pengajar pada Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA

sekitarnya. Anak di sekolah telah terkungkung dan terpenjara (*prisoned*) selama berjam-jam, yang berarti mereka telah dilepaskan dari persoalan-persoalan riil masyarakat. *Ketiga*, bahwa dengan adanya sekolah, anak telah terpola dan mengidap mental kecanduan (*addictive*) terhadap ritualisme sekolah (pendidikan).

Sisi lain dari pandangan yang berkembang dewasa ini terlepas dari kritik Illich, Reimer, dan Freire di atas, secara struktural kita melihat sekolah atau lembaga pendidikan umumnya telah terbangun dan terpola jaringan relasi dominasi yang sedemikian kuat. Dimana guru telah menempatkan dirinya sebagai sosok *dominan* yang menguasai dan mengendalikan segenap keinginan dan perilaku siswa di sekolah. *Dominasi* atau "*hegemoni*"--meminjam istilahnya Antonio Gramsci ini dicapai tidak hanya pada penguasaan dan pengendalian segenap sumber-sumber pembelajaran yang ingin diterapkan pada siswa, tetapi juga pada mentalitas dan cara berpikir siswa. Dominasi terhadap mentalitas dan cara berpikir siswa tersebut paralel dengan apa yang disebut Illich dengan istilah "*ritualisme pendidikan*". Ritualisme pendidikan telah direproduksi terus-menerus sedemikian rupa yang puncaknya menjadikan semua kebiasaan ritual tersebut menjadi bagian dari kesadaran anak.

Dari kondisi itulah, agaknya kendala-kendala di atas mestinya perlu dieliminasi secara tuntas, sehingga memunculkan pemikiran yang terkadang dirasa radikal. Yaitu dengan cara mendekonstruksikan tatanan relasi dominasi yang ada, yang kemudian mengkonstruksi kembali relasi struktural diantara pelaku dan komponen pendidikan tersebut agar lembaga sekolah dan pendidikan pada umumnya tidak dianggap "gagal" dalam mengemban misi dan fungsinya untuk mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang pada UU No.2 tahun 1989. Persoalannya adalah 'bagaimana mungkin dilakukan konstruksi ulang atas tatanan relasi dominasi guru/sekolah yang konon sudah berlangsung berabad-abad?' Bila mungkin, kekuatan dan prasyarat apa yang mampu mendukung upaya tersebut?

Relasi Dominasi Kekuasaan Guru

Dari sudut pandang sosiologi pengetahuan, suatu komunitas, termasuk komunitas di sekolah, sesungguhnya tersusun atas relasi-relasi struktural yang mengindikasikan adanya dominasi kelompok satu terhadap lainnya. Salah satu pencapaian dominasi oleh kelompok tertentu ini antara lain melalui penciptaan wacana, sehingga dalam interaksi antar kelompok dalam komunitas sekolah tersebut sebenarnya terjadi tarik-menarik kepentingan dan dominasi yang terwujud melalui --meminjam istilah Muhammad AS Hikam-- "*transaksi wacana*" (1996: 85). Dalam konteks inilah, kelompok yang mempunyai status sosial lebih tinggi, cenderung menguasai dan mengontrol dalam memproduksi/reproduksi wacana.

Guru sebagai kelompok dalam masyarakat sekolah, oleh karena memiliki status sosial lebih tinggi *vis a vis* kelompok siswa, maka kelompok guru ini cenderung mampu mengontrol dalam proses "*transaksi wacana*" untuk memperoleh dominasinya atas siswa, dengan demikian ia mampu menguasai dan mengendalikan siswa. Tidak hanya mendominasi, bahkan menurut Ivan Illich guru atau sekolah mampu *memonopoli* atas segenap sumber-sumber pembelajaran serta pengesahan peran sosialnya untuk mengendalikan keseluruhan siswa. "*...Having a monopoly on both the resources for learning and the investiture of social roles, the university or school coopts the discoverer and the potential dissenter*" (1972: 50).

Dalam rentang jenjang pendidikan yang ada, dominasi guru terhadap siswa berlangsung sesuai kurve normal. Pada jenjang pendidikan pra sekolah (TK), dominasi guru berlangsung longgar. Namun pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP), dominasi ini berlangsung kuat, bahkan menjadi semakin kuat yang berpuncak pada jenjang pendidikan menengah (SMU). Sedang pada jenjang pendidikan tinggi, dominasi itu mengendor lagi.

Semenjak jenjang pendidikan prasekolah, siswa sudah diperkenalkan wacana-wacana yang dikemas dalam bentuk lagu-lagu yang mengandung makna implisit "pengendalian" mental dan perilaku siswa. Reproduksi wacana itu diwujudkan dalam praksis pendidikan misalnya: anak harus diam, melipat tangan, mendengarkan guru, menyenangkan guru agar tidak kena marah.

Wacana-wacana tersebut terus direproduksi kembali dan berkembang di saat anak mengenyam pendidikan di SD dan SLTP. Seperti: sikap disiplin, berpakaian seragam (berkembang pada berpikir seragam), OSIS, Pramuka, upacara bendera, dan ketundukan pada guru. Kemudian reproduksi wacana ini semakin lengkap diterima anak di saat ia memasuki pendidikan menengah (SMU). Seperti wacana: wawasan wiyata mandala, tata krama, pekerjaan rumah (PR), keterampilan tambahan, tidak merokok, tidak banyak pacaran, persiapan masa depan, dan lain-lain yang secara eksplisit demi kepentingan siswa tetapi secara implisit bermakna kontrol dan pengendalian.

Ada juga wacana-wacana umum yang diproduksi untuk menciptakan dan memperkuat kekuasaan guru. Sehingga wacana-wacana ini seolah-olah menjadi dalil dan norma yang harus dibenarkan siswa. Ada delapan proposisi wacana mengenai hal ini: (1) guru adalah sumber belajar utama, (2) guru sebagai perencana pembelajaran, (3) guru menilai murid, (4) guru mengajar dan murid belajar, (5) guru memproduksi wacana murid menerimanya, (6) pembelajaran berdasarkan kurikulum guru, (7) pembelajaran melalui pengenalan objek, (8) pengetahuan berasal dari luar diri siswa.

Faktor Genesis Relasi Dominasi Guru

Secara umum, dominasi guru atas keseluruhan siswa di atas, disebabkan oleh tiga faktor munculnya (genesis) dominasi tersebut: *pertama*, guru/sekolah merupakan kepanjangan tangan dari rezim penguasa negara. Karenanya segenap kebijakan dan perlakuannya

terhadap siswa memiliki bias-bias politik demi kepentingan kekuasaan. *Kedua*, posisi sosiologis yang dimiliki guru dalam struktur masyarakat sekolah sebagai kelompok elit, yang tentu saja ia mampu mengontrol dan mengendalikan kelompok di luar elit yaitu masyarakat siswa (*pupil society*). Dan *ketiga*, oleh karena guru adalah kepanjangan tangan rezim penguasa serta sebagai elit masyarakat sekolah, maka ia dengan mudah memproduksi sekaligus mempunyai kekayaan wacana.

Dari ketiga faktor itulah guru/sekolah mempunyai relasi dominasi. Relasi dominasi ini difungsikan oleh guru secara maksimal untuk mengontrol dan mengendalikan siswa melalui produksi dan reproduksi wacana. Memang pada awalnya wacana dan transaksi komunikatif (*communicative transactions*) dari guru kepada siswa ini menurut Habermas (1981) adalah upaya untuk mencari titik temu dan saling pengertian antar peserta komunikasi. Namun pada kenyataan menurut Saphiro (1981) wacana dan transaksi komunikatif tersebut kemudian lebih menekankan kepada konstelasi kekuatan apa yang ada dalam proses pembentukan dan reproduksi makna. Sebab menurut Saphiro (1981), wacana tak lagi sebagai alat atau medium "netral" melainkan lebih merupakan representasi, dalam dirinya sendiri, dari hubungan-hubungan politis dan merupakan ruang (*space*) bagi penggelaran kekuasaan tertentu.

Menurut Foucault (dalam Muhammad AS Hikam, 1996: 86), melalui wacana tertentu yang diproduksi dan direproduksi tersebut di atas, hubungan-hubungan kekuasaan diciptakan dan didistribusikan dalam batang tubuh masyarakat (termasuk di dalamnya masyarakat sekolah). Proses terwujudnya dominasi atau hegemoni--meminjam istilahnya Gramsci, pada komunitas sekolah ini, dalam kadar tertentu identik dengan dominasi negara atas masyarakat sipil. Dimana dominasi negara atas masyarakat sipil itu bukan saja melalui penggelaran aparaturnya represif untuk mengendalikan oposisi dan pembangkangan, tetapi tak kalah hebatnya adalah melalui upaya-upaya pengendalian dan manipulasi

sistem-sistem reproduksi ideasional demi meratakan jalan bagi pengoperasian *hegemoni makna* (Yudi Latif dan Subandy Ibrahim, 1996: 28).

Dekonstruksi Wacana dan Praksis Pendidikan

Dari fenomena keterbelengguan siswa atas dominasi guru atau sekolah melalui wacana-wacana yang diproduksi dan direproduksi di atas, maka muncul banyak pemikiran untuk mengeliminir kendala itu. Diantara pemikiran yang muncul adalah perlunya dekonstruksi wacana dan praksis pendidikan yang dirasa telah mengendalikan dan memasung siswa, dan membiarkan siswa memproduksi wacananya sendiri untuk kepentingan dirinya. Karena itu yang mula-mula muncul adalah *hegemony* dilawan dengan *counter-hegemony*. Sebagaimana terjadi dalam hubungan negara dengan petani, menurut Scott terjadi "*everyday forms of repression*" dihadapi dengan "*everyday forms of resistance*" (Hotman M. Siahaan, 1997: 77).

Memang, fenomena hubungan antara guru dengan siswa dalam komunitas sekolah tidak sama dan sebangun dengan hubungan negara dengan masyarakat sipil atau hubungan penguasa dengan petani tradisional, namun dari segi tertentu nuansa dominasi guru atas siswa secara nyata terlihat. Suasana keterbelengguan dan keterpasungan siswa sangat dirasakan. Apalagi ditandai dengan banyaknya protes-protes siswa atas penampilan dan kebijakan guru, yang sedikit paralel dengan protes-protes *civil society* atas hegemoni negara. Sehingga protes siswa dengan berbagai bentuknya kepada guru dan sekolah merupakan salah satu bentuk "*counter-hegemony*".

Dalam rangka pembongkaran kembali wacana-wacana yang direproduksi guru di atas, "*counter-hegemony*" melalui penciptaan wacana tandingan nampaknya lebih relevan. Delapan proposisi wacana dari guru di atas, kiranya harus dilawan dengan *proposisi tandingan*, yakni: (1) guru bukanlah sumber belajar utama, tetapi siswa; (2) guru bukanlah perencana pembelajaran, tetapi siswa; (3) guru menilai siswa,

namun siswa juga berhak menilai guru; (4) bukan guru mengajar dan murid belajar, namun guru dan murid sama-sama saling belajar; (5) guru dan murid bersama-sama dalam memproduksi wacana; (6) pembelajaran bukan berdasarkan kurikulum milik guru, namun berdasarkan kontrak bersama; (7) pembelajaran bukan melalui *pengenalan* subjek dari objek, tetapi melalui *pemberian atribut* oleh subjek kepada objek; (8) pengetahuan bukan berasal dari luar siswa, tetapi dari dalam diri siswa.

Dari sini jelas bahwa wacana tandingan tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan posisi tawar siswa dihadapan dominasi guru yang konon sudah berlangsung berabad-abad. Adapun pembongkaran terhadap wacana dan praksis pendidikan lama ini, bila ditarik lebih jauh berarti juga pembongkaran kembali terhadap dominasi akan akar historis filsafat pendidikannya, yakni dari filsafat pendidikan *perennialisme* menjadi *progresivisme*. Sehingga dalam praksisnya tidak lagi *guru sentris* tetapi *siswa sentris*, atau paling tidak pola hubungan guru siswa yang seimbang (demokratis).

Sedangkan pola hubungan yang demokratis sebagaimana diharapkan di atas akan dapat dicapai bila kelompok yang tersubordinasi (siswa) disadarkan atau lebih jauh lagi "*dicerahkan*". Bagi J. Habermas (Heru Nugroho, 1997: 26), pencerahan merupakan sebuah filsafat yang memiliki semangat membebaskan manusia dari berbagai bentuk dominasi kekuasaan maupun hegemoni kesadaran. Sedangkan pencerahan itu sendiri dapat direalisasikan melalui terwujudnya "*ketidak-terbatasan wacana*" dari warga masyarakat (dalam konteks ini warga sekolah) tentang persoalan-persoalan yang dihadapi.

Tipe masyarakat yang ideal menurut Habermas (Heru Nugroho, 1997: 28) adalah masyarakat yang mengalami perluasan komunikasi dimana maksud komunikasi tersebut dibimbing oleh norma yang disepakati (*concensual norms*) sehingga terhindar dari adanya kondisi-kondisi reifikasi, alienasi, totalitarian, dan dominasi.

Kesimpulan

Tidak bisa dipungkiri bahwa distorsi penyelenggaraan pendidikan khususnya di Indonesia sesungguhnya telah terjadi sejak lama. Distorsi ini tidak saja pada bentuk-bentuk transformasi pembelajaran di sekolah, tetapi juga pada pola hubungan antara guru terhadap siswa. Banyak ahli seperti Ivan Illich, Everett Reimer, dan Paulo Freire, setidaknya telah mengkritik tajam pada eksistensi kelembagaan dan bentuk transformasi pembelajaran di sekolah. Namun sisi lain yang belum banyak disentuh oleh ketiga tokoh tersebut adalah pada fenomena *relasi dominasi* guru atas siswa. Relasi-relasi yang dibangun secara sistematis oleh guru terhadap siswa ini memperoleh pembenarnya melalui wacana yang diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus dalam rangka mengontrol dan mengendalikan siswa.

Dalam proses produksi wacana dan transaksi komunikatif dari guru kepada siswa, pada awalnya memang untuk mencari titik temu dan saling pengertian antar peserta komunikasi. Namun kemudian wacana dan transaksi komunikatif tersebut akhirnya menekankan pada konstelasi kekuatan apa yang ada dalam proses pembentukan maknanya, sehingga wacana ini tak lagi menjadi medium "*netral*" melainkan lebih merupakan representasi dari hubungan politis dan merupakan ruang (*space*) bagi penggelaran kuasa-kuasa tertentu.

Dominasi guru atas siswa ini secara umum berlangsung sebagaimana kurve normal. Pada jenjang pendidikan prasekolah (TK), dominasi guru berlangsung longgar. Namun pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP), dominasi ini berlangsung kuat, bahkan menjadi semakin kuat yang berpuncak pada jenjang pendidikan menengah (SMU). Kemudian mengendor lagi pada jenjang pendidikan tinggi.

Oleh karena dominasi tersebut dirasa banyak ahli telah menyebabkan keterbelengguan dan keterpasungan beberapa siswa, maka upaya untuk mengeliminir dari keterbelengguan dan keterpasungan itu kiranya perlu diruntuhkannya relasi dominasi tersebut melalui *wacana*

tandingan. Wacana tandingan ini terutama dimaksudkan agar terjadi "transaksi komunikasi" sehingga terwujud masyarakat sekolah yang mengalami perluasan komunikasi yang dibimbing oleh *consensual norms*. Dengan demikian pada akhirnya akan diperoleh wacana-wacana baru yang berlanjut pada praksis pendidikan baru yang tentu dapat memberdayakan siswa untuk berkreasi dan berimprovisasi secara bebas. Sehingga pola hubungan guru-siswa diharapkan menjadi lebih *egaliter* dan *demokratis*.

Daftar Pustaka

- Habermas. (1981). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Heru Nugroho. (1997). *Kritik Habermas Terhadap Postmodernism dan Relevansinya Bagi Pemahaman Pembangunan*. UNISIA: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Nomor: 32/XVII/IV/1997. UII Yogyakarta.
- Hotman M. Siahaan. (1997). *Dinamika Politik Kelompok Marginal*. Dalam, Basis Susilo (ed): Masyarakat dan Negara. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Illich, Ivan. (1972). *Deschooling Society*. New York: Harrow (Harper & Row) Books.
- Muhammad AS Hikam. (1996). *Bahasa dan Politik: Penghampiran "Discursive Practice"*. Dalam Yudi Latif dan Subandy Ibrahim (ed): Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Bandung: Mizan.
- Reimer, Everett. (1987). *School Is Dead: An Essay on Alternatives in Education*. Diterjemahkan: Soedomo. 1987. Sekitar Eksistensi Sekolah. Yogyakarta: Hanindata Offset.

Saphiro, M. (1981). *Language and Political Understanding: The Politics of Discursive Practice*. New Haven: Yale University.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yudi Latif dan Subandy Ibrahim. (1996). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.